

Pengaruh Retribusi Daerah, DAK dan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota

Mirwansyah Putra Ritonga
Universitas Imelda Medan
Ritonga010790@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analyze partially and simultaneously the effect of regional retribution, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on regional expenditure in North Sumatra Province. The sample in this study is a financial area that is categorized as low, namely 5 districts and 5 cities, all of which consist of 22 regions and 5 years of observation so that the total number is 110 observations. Data analysis using multiple linear regression statistical tests. The results showed that partially the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund had a significant effect on regional expenditure in North Sumatra Province. The regional levies and , General Allocation Funds have no significant effect on regional spending in North Sumatra Province. Meanwhile, simultaneously there is a significant influence between regional retribution, , General Allocation Funds, and Special Allocation Funds for regional expenditure in Districts and cities.

Keywords: regional expenditure, regional retribution, BUMD profits, general allocation funds, special allocation funds

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah daerah keuangan yang dikategorikan rendah yaitu 5 kabupaten dan 5 kota, seluruhnya terdiri dari 22 daerah dan 5 tahun pengamatan sehingga total berjumlah 110 amatan. Analisis data menggunakan uji statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara. Adapun retribusi daerah dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah di kabupaten/kota.

Kata Kunci: belanja daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan asli daerah menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena pendapatan asli daerah ini sendiri merupakan komponen penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut. Sedangkan pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menjamin tercapai standar pelayanan publik. Dana perimbangan oleh pemerintah pusat seharusnya bukan menjadikan pemerintah bergantung sepenuhnya terhadap pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahan. Namun pemerintah daerah dituntut agar tetap memaksimalkan potensi daerah untuk menghasilkan sendiri sumber pendanaan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2007) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau memberi izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan (UU No. 1 Tahun 2011)

Akan tetapi alokasi belanja daerah belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Dalam hal ini dapat kita lihat dari realisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pada realisasi tahun 2015 - 2016 mengalami penurunan di realisasi retribusi daerah dari 36.162.915.271 – 30.025.468.718. tetapi tidak diikuti dengan belanja daerah yang ditahun 2015 - 2016 mengalami kenaikan dari 7.959.167.184.000 – 9.476.423.915.000 dan ini bertolak belakang dengan teori. Teori menyatakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwono (2012) menyatakan bahwa dimana disimpulkan pajak retribusi mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dimana apabila pajak retribusi naik maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

Pada realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari 1.349.132.276.000 – 1.139.261.371.000 tetapi tidak diikuti dengan belanja daerah tahun 2014-2015 yang mengalami kenaikan dari 7.808.557.310.000 – 7.959.167.184.000, dan ini bertolak belakang dengan teori. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah jika dana alokasi umum rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Abdullah & Halim 2003).

Pada realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari 59.728.388.000 – 47.746.880.500, tetapi tidak diikuti dengan belanja daerah tahun 2014-2015 yang mengalami kenaikan dari 7.808.557.310.000 – 7.959.167.184.000, dan ini bertolak belakang dengan teori.

Semakin besar dana alokasi khusus ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah, jika dana alokasi khusus rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Abdullah & Halim 2003). Alasan peneliti memilih Objek penelitian pada Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara ini karena berbagai alasan, diantaranya mudah dijangkau, dan perusahaan tersebut punya pengaruh yang besar dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten dan kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas. Tujuan transfer Dana Alokasi Umum adalah sebagaimana pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.2 Dana Alokasi Khusus

DAK adalah Alokasi dari anggaran dan pendapatan belanja daerah kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk didalam dana perimbangan.

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri negara perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan rencana kerja pemerintah dimaksud. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan

prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

2.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian yang bersifat angka.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Retribusi Daerah (X_1) sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dana Alokasi Umum (X_2) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (X_3) merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Belanja daerah adalah (Y) adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang terjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 daerah yaitu 25 kabupaten dan 8 kota dari tahun 2014-2018. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu menjadi perhatian. Sampel peneliti menggunakan sampel random, Sampel dalam penelitian ini adalah daerah keuangan yang dikategorikan rendah yaitu 5 kabupaten dan 5 kota, seluruhnya terdiri dari 22 daerah x 5 tahun = 110 (N) jadi ini merupakan sampel penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Penulis mengumpulkan data yang didapatkan dari berbagai sumber antara lain data yang tercatat di BPS dan situs Dirjen Perimbangan Keuangan Negara yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang terdiri dari pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi) serta uji hipotesis (uji simultan dan uji parsial).

3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan terlebih dahulu adalah uji normalitas. Tabel 1 menunjukkan hasil uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

		Unstandardized Residual
N		110
	Mean	-.0001529
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	117741160775.494
		54000
	Absolute	.075
Most Extreme Differences	Positive	.075
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.791
Asymp. Sig. (2-tailed)		.559

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.

Berdasarkan tabel 1. di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan ($\text{sig } 0.200 > 0,05$) artinya data antara variabel dependen dan variabel independennya memiliki hubungan atau distribusi yang normal atau memenuhi uji asumsi knormalitas karena mempunyai nilai signifikan lebih besar dari pada 0,05 yaitu 0,559.

Pengujian asumsi klasik berikutnya yaitu uji multikolinearitas. Tabel 2 menunjukkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Multikolinearitas Coefficient

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.773	1.294
.878	1.139
.627	1.594
.786	1.272

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas didapatkan hasil uji nilai VIF dibawah 5,0 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

3.7 Uji Hipotesis

Output hasil analisis regresi berganda dan uji hipotesis parsial dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis Parsial

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics
-------	-----------------------------	--------------------------	---	------	-------------------------

				s				
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.887	.371		-2.390	.019		
	LOG_X1	-.029	.013	-.071	-2.338	.022	.773	1.294
	LOG_X3	.970	.039	.839	24.779	.000	.627	1.594
	LOG_X3	.155	.016	.288	9.521	.000	.786	1.272

Hasil output model *coefficients* di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : Belanja Daerah = -0.887 + 0.029_{RD} + 0.970_{DAU} + 0.016_{DAK}

Keterangan :

- Konstanta sebesar -0,887 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan maka belanja daerah pada provinsi Sumatera Utara sebesar -0,887.
- β_1 sebesar -0,029 dengan arah hubungan negatif menunjukkan bahwa apabila retribusi daerah mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan penurunan belanja daerah sebesar -0,029 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- β_3 0,970 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah sebesar 0,970 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- β_4 0,016 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah sebesar 0,016 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah diperoleh $-2,338 > -2,110$. Dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,22 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh negatif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada provinsi Sumatera Utara. Apabila semakin tinggi retribusi daerah maka tidak akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah diperoleh $24,779 < 2,110$. Dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah pada provinsi Sumatera Utara. Artinya apabila semakin tinggi penerimaan Dana Alokasi Umum maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah diperoleh $9,521 < 2,110$. Dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah pada provinsi Sumatera Utara. Artinya apabila semakin tinggi penerimaan Dana Alokasi Khusus maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah.

Adapun hasil pengujian simultan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Hasil Uji Simultan (Anova)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.927	4	.482	328.950	.000 ^b
Residual	.110	75	.001		
Total	2.037	79			

a. Dependent Variable: LOG_Y

b. Predictors: (Constant), LOG_X4, LOG_X1, LOG_X2, LOG_X3

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} pengaruh retribusi daerah, laba BUMD, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah diperoleh 328,950 dengan signifikan 0,000. Nilai F_{hitung} (328,940) > F_{tabel} (4,49), dan nilai signifikan (0,000) < dari nilai probabilitas (0,05). Dari hasil perhitungan SPSS diatas menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Secara parsial tidak ada pengaruh negatif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota
- Secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota
- Secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota.
- Secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi, Maulidah Rahmawati. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- [2] Nia Sari, Ratna Wardani. 2016. *Pengelolaan dan Analisa Data Statistika*. Deepublish: Jakarta
- [3] Sjafrizal. (2014). *Pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [4] Karo-Karo, Surbakti. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten-Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Telaah Akuntansi*, Juni 2014, Volume 17 No. 1. Universitas Negeri Medan.
- [5] Nugraeni. 2011. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota Di Indonesia)". *Jurnal Akmenika UPY*, Volume 8, 2011.
- [6] Sarwono Edy (2012). *Pengaruh Pajak Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah, Pendapatan Lainnya Sah dan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Belanja Daerah Pada Kabupaten/kota Se-Indonesia Tahun Anggaran 2010- 2011*. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- [7] Suwarno, Endro Agus, dan Suhartiningih. 2008. "Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7, No.

2. Universitas Muhammdiyah Surakarta.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia 33 Tahun 2004 tentang perimabngan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- [9] Pemendagri No.13 Tahun 2006. Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perda No. 1 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Provinsi sumatera utara.